



Bus Sekolah Hilang, Transjakarta Gratis Terbilang

Subsidi akan dialihkan untuk Kartu Jakarta Pintar.

Bus-bus sekolah yang mengantarkan-jemput para pelajar Jakarta selama ini ternyata mubazir. Menurut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, bus-bus itu tak mengangkut pelajar miskin di Ibu Kota dan tidak semuanya terpakai mengangkut siswa. "Lebih banyak yang memakai angkutan umum," kata Basuki, Rabu lalu.

Karena itu, pemerintah berencana menghapus bus-bus sekolah itu. Unit pelaksana teknis bus juga akan dihapus karena menghabiskan anggaran untuk pengoperasian dan pengadaannya. "Percuma diberi subsidi puluhan miliar," kata Basuki.

Para pelajar Jakarta akan didorong memakai bus Transjakarta. Apalagi bus pemerintah ini akan terintegrasi dengan Kopaja sehingga armadanya bertambah dan bisa menjangkau seluruh wilayah. Uang subsidi bus sekolah akan dialihkan untuk bantuan Kartu Jakarta Pintar.

Dengan menunjukkan kartu itu, kata Basuki, para pelajar bisa gratis naik Transjakarta ke semua tujuan. Kartu itu akan dilengkapi dengan *chip* sebagai bukti pembayaran bus. "Cara ini sekaligus bisa untuk memantau pergerakan pelajar di Jakarta," kata Basuki.

Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat juga sepakat dengan ide ini. Menurut dia, penyediaan bus sekolah selama ini tak efektif. Hingga saat ini, rute bus sekolah belum menjangkau seluruh siswa yang ada. "Dan apakah bus sekolah tersebut juga penuh oleh siswa, itu masih jadi pertanyaan," ujar Djarot.

Djarot mengatakan, biaya operasional bus sekolah dirasa terlalu besar ketimbang efektivitas penggunaannya. Bahkan, menurut dia, pengoperasian bus sekolah juga berpotensi disalahgunakan karena tak terpantau oleh pemerintah.

Anggaran operasional unit layanan bus di Dinas Perhubungan untuk bus sekolah tahun lalu Rp 10,6 miliar. Sedangkan biaya jasa operator angkutan bus sekolah bus kecil Rp 8,25 miliar. Menurut Djarot, anggaran tersebut mubazir karena tak bisa mengangkut semua pelajar.

Anggota Dewan dari Komisi E, Ahmad Nawawi, mendukung rencana pemerintah menghapus bus sekolah. Namun dia tak sependapat jika subsidi untuk transportasi bagi siswa tak mampu disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar. Nawawi khawatir bantuan tersebut akan disalahgunakan. Menurut dia, Kartu itu seharusnya otomatis menjadi alat pembayaran siswa tanpa mendapat pengalihan subsidi.

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 270 Jakarta, Pua Manggarani, juga mendukung rencana gubernur tersebut. Menurut dia, selama ini bus sekolah sering tak ada saat anak berangkat ke sekolah dan pulang dari sekolah. "Selain itu, sering kali sopir bus enggan mengantarkan-jemput siswa saat kondisi jalanan macet," katanya.

Unit Pelaksana Teknis Bus Sekolah mengambil alih operasi bus sekolah dari Perum Pengangkutan Djakarta awal tahun lalu setelah kontraknya selesai. Dalam pengelolaannya, puluhan sopir dan kondektur bus sekolah pernah mogok karena menuntut pembayaran upah.